

BAB III

PEMBAHASAN

A. KINERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Dalam menjalankan kinerja pemerintahan kota, tentunya pemerintah kota Yogyakarta mempunyai arah dan tujuan kemana tata pemerintahannya akan dibawa. Sehingga untuk menentukan arah kebijakan pemerintah kemudian menjadikan visi dan misi kepada daerah sebagai acuan kinerja yang akan dicapai. Dari visi misi daerah dan kepala daerah ini kemudian dibuatkannya dokumen perencanaan jangka menengah daerah atau yang sering dikenal dengan RPJMD (Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah). Dalam dokumen perencanaan ini dimuatkan sasaran kinerja yang akan dicapai selama jangka waktu 5 (lima) tahun atau satu masa jabatan kepala daerah.

Setelah terbentuknya perencanaan jangka menengah kemudian dari sinilah kemudian SKPD membuat Renstra (Rencana Strategis) sebagai pedoman kerja instansi yang mengarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMD. Untuk melihat hasil kinerja pemerintah selama satu tahun kemudian pemerintah membuat evaluasi yang tertuang dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan). Dalam dokumen evaluasi LAKIP ini pemerintah menyampaikan hasil capaian kinerja beserta jumlah anggaran yang digunakan untuk menjalankan kebijakan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi pemerintah Kota Yogyakarta memiliki 4 (empat) sasaran pembangunan 2012-2016 yaitu:

- (1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran
- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran
- (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran
- (4) Memperkuat daya saing daerah untuk memajukan Kota Yogyakarta

Tabel 3.1: Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan
		Terwujudnya pendayagunaan aparatur
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua
		Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu
		Terwujudnya sarana dan prasa- rana perkotaan yang
		Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi
		Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Mewujudkan daya saing daerah yang kuat	Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya
		Terwujudnya perekonomian daerah yang
		Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

*Sumber: LAKIP 2013 Kota Yogyakarta

Pada tabel 3.1 diatas dijelaskan keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sehingga dapat diketahui bahwa sasaran yang dibuat adalah upaya pencapaian misi daerah atau kepala daerah. Adapun aspek-aspek penilaian yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri dalam melihat keberhasilannya adalah:

A. Manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan

Manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu *”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih”* dan juga untuk mencapai tujuan: *”Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas”*. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu: (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, (2) Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal, (3) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas ditampilkan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah

Daerah yang berkualitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta	B	CC	
	Opini Laporan Keuangan	Wajar	WTP	

yang berkualitas	Oleh Auditor Eksternal			
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Tinggi	Sangat Tinggi	

*Sumber: LAKIP 2013 Kota Yogyakarta

Terlihat dari tabel 3.2 diatas pada sasaran pertama ini 3 (tiga) indikator sasaran tersebut belum dapat diketahui hasilnya pada saat LAKIP Tahun 2013 disusun. Hal ini disebabkan karena ketiga indikator masih dalam proses penilaian dari Pemerintah pusat yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan serta Menteri Dalam Negeri.

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta

Dua tahun berturut hasil evaluasi LAKIP tahun 2011 dan 2012 memperoleh nilai dengan kategori CC dan pada tahun 2013 realisasi LAKIP Kota Yogyakarta mencapai nilai CC. Meskipun demikian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 2,16 yaitu pada tahun 2011 memperoleh nilai sebesar 55,17 dan pada tahun 2012 sebesar 57,33. Hasil penilaian tersebut mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2. Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal

Opini Laporan keuangan oleh auditor eksternal ketika LAKIP ini disusun juga masih dalam proses audit BPK sehingga belum dapat diketahui hasil capaiannya. Namun demikian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 hasil audit

BPK dinyatakan Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Berdasarkan tabel 3.1 opini laporan keuangan oleh auditor eksternal pada tahun 2013 juga mendapat kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga dengan nilai tersebut mencerminkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta telah menjalankan manajemen pemerintahan daerah yang baik dan berkualitas.

3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Sebagai salah satu alat untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap tahun melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 120-251 tanggal 24 Maret 2014, tentang Penetapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012, Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh skor sebesar 3.0620 dengan peringkat 15 (lima belas) tingkat Nasional untuk kategori Pemerintah Kota.

Dalam wawancara terbuka dengan kepala sub bagian pengembangan otonomi daerah bagian tata pemerintahan Dyah Intan Usaratri, SIP, MA, M.Eng pada tanggal 20 Mei 2016 pukul 09.35 wib beliau menyampaikan:

“Pemkot Yogyakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja, sehingga semua kegiatan yang diselenggarakan memang benar-benar di seleksi melalui hasir musrenbang yang dilakukan secara berjenjang. Dan selain itu kita juga menerapkan

pelayanan perizinan satu pintu serta menerapkan pelayanan yang transparan mulai dari tingkat kecamatan. Sehingga proses pemerintahan memang benar benar dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat luas”.

Langkah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan manajemen Pemerintahan yang baik dan bersih antara lain semua pengajuan anggaran kegiatan berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja , artinya Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

Semua permohonan usulan masyarakat dilakukan melalui musrenbang secara berjenjang, pelayanan umum masyarakat dilakukan secara transparan dapat dilihat dari pelayanan di Dinas perizinan maupun di Kecamatan yang ruangnya didesign terbuka , pemohon dilarang bertemu Kepala SKPD yang membidangi pelayanan , semua pelayanan dilakukan melalui satu pintu sejak

dari proses permohonan hingga pengambilan. Pemkot Yogyakarta telah menerapkan sistem Reformasi birokrasi dan telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB

B. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah didalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah puncak dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Lebih dari satu dasawarsa, sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan, telah banyak hal yang terjadi didaerah. Pemerintah terlihat juga terus berupaya untuk selalu mengembangkan pola dan sistem pelaksanaan desentralisasi tersebut. Pendek kata, desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Membangun daerah tentu tidak bisa serampangan dilakukan. Perlu strategi yang terukur dan sistematis agar bisa mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Beberapa hal yang penting yang dapat dipedomani didalam implementasi strategi pembangunan daerah.

Pertama, pemihakan kepada rakyat (pro rakyat). Strategi ini merupakan salah satu pendekatan paling tepat untuk percepatan pembangunan daerah. Strategi pemihakan berhubungan erat bagaimana pemerintah daerah turut membuka ruang

keterlibatan atau partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Pemihakan juga menjadi penting mengingat otonomi daerah memang ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan dalam kehidupannya. Pemihakan juga sangat krusial bagi pembangunan, terutama untuk daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang umumnya rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan akibat berbagai aktivitas manusia.

Pemihakan juga sangat penting untuk memperkecil kesenjangan antara wilayah relatif cepat berkembang dengan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan. Pada tahapan ini, pemihakan akan diarahkan untuk memperbaiki dan memperkuat berbagai program pemerintah dalam membangun daerah.

Kedua, melaksanakan pembenahan terhadap seluruh aspek penting daerah, seperti aset, sumber daya dan birokrasi. Pembenahan dinilai sebagai salah satu strategi yang akan mendukung program pembangunan di daerah. Dalam koridor reformasi pemerintahan, pembenahan diarahkan pada reformasi institusional, mekanisme dan kinerja pelayanan dari berbagai institusi publik berdasarkan prinsip good governance dan clean government sehingga semua institusi ini dapat berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Regulasi-regulasi daerah yang dinilai tidak relevan dengan penyelenggaraan otonomi daerah harus disesuaikan.

Dalam koridor reformasi ekonomi, pembenahan dilakukan untuk menyokong kepentingan yang menjadi basis ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur dasar ekonomi, seperti pasar dan sistem. Selain itu,

pembenahan atas perjanjian-perjanjian perdagangan dan kerjasama seperti Border Crossing.

Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta melalui 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: (1) Terwujudnya Peningkatan kualitas ekonomi Masyarakat dan (2) Terwujudnya Kualitas sosial masyarakat. Pada tahun 2013 capaian kinerja pemerintah untuk masing-masing sasaran strategis dapat dikategorikan menjadi sangat baik. Hal tersebut didukung oleh realisasi yang cukup tinggi dari indikator-indikator dari masing-masing sasaran.

Berikut dibawah ini capaian kinerja sasaran “*terwujudnya Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat*”

Tabel 3.3 Terwujudnya Peningkatan kualitas ekonomi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Peningkatan kualitas ekonomi Masyarakat	Pendapatan per kapita	Rp. 16.627.646	Rp. 16.627.646	100%
	Jumlah koperasi aktif	460	466	101,30%
	Jumlah pelaku UMKM	22.591	22.628	100,16%

*Sumber: LAKIP 2013 Kota Yogyakarta

Berdasarkan penjelasan tabel diatas yang pemerintah lakukan untuk kesejahteraan masyarakat adalah dengan cara mewujudkan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, hal tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) indikator yaitu:

a. Pendapatan per kapita

Pada tahun 2012 pendapatan perkapita sebesar Rp. 15.612.924 sedangkan untuk tahun 2013 di targetkan Rp. 16.627.646. Adapun realisasinya pada tahun 2013 mencapai Rp 16.627.646 dengan capain kinerja 100%. Melihat realisasi pada tahun ini mampu mencapai target sehingga dengan meningkatnya perndapatan perkapita menjadi salah satu bentuk bagian dari kesejahteraan masyarakat.

b. Jumlah koperasi aktif

Berdasarkan tabel 3.3 jumlah capaian koperasi aktif tahun 2013 telah melebihi target yang di tetapkan yaitu sebesar 101,75% dengan realisasi 466 koperasi aktif dari jumlah target 460 koperasi aktif untuk tahun ini. Di bandingkan pada tahun 2012 jumlah koperasi aktif mengalami penambahan sebanyak 2 koperasi.

c. Jumlah pelaku UMKM

Berdasarkan tabel 3.3 diatas capaian pelaku usaha mikro kecil dan menengah tahun 2013 telah melebihi target yang di tetapkan sebesar 101% dengan realisasi 22.628 dari jumlah target 22.591. Di banding pada tahun 2012 jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah hanya 22.312 pelaku usaha. Melihat tingginya realisasi terhadap capaian tahun 2013 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya menandakan adanya kenaikan yang sangat signifikan terhadap jumlah pelaku UMKM. Sehingga semakin banyak pelaku UMKM menjadi salah satu bentuk perubahan yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain melalui peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, pemerintah Kota Yogyakarta juga memandang kualitas aspek sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Adapun untuk mewujudkan aspek social ini pemerintah Kota Yogyakarta melakukannya melalui capaian beberapa indicator kinerja seperti tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4 Terwujudnya Kualitas sosial masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya	Angka kemiskinan	9%	9%	100%
Kualitas sosial masyarakat	Tingkat intensitas pengendalian frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena SARA dan kesenjangan sosial	37,3%	40%	107,24%

*Sumber: LAKIP 2013 Kota Yogyakarta

a. Angka kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Yogyakarta. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Adanya kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi

kebutuhan hidup minimal. Tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2012 adalah sebesar 9,38%. Di tahun 2013 realisasi angka kemiskinan di perkirakan sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 9% sehingga ada penurunan sebesar 0,14% dibandingkan tahun lalu. Dengan turunnya angka kemiskinan ini menandakan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

b. Tingkat intensitas pengendalian frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena SARA dan kesenjangan sosial

Di Kota Yogyakarta tingkat intensitas konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial sangat rendah dikarenakan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA) yang intensif mengantisipasi berbagai macam perselisihan yang berindikasi SARA maupun kesenjangan sosial. Kepemudaan yang tidak dapat menerima Dana stimulan, hal ini mengakibatkan organisasi kepemudaan tersebut tidak aktif.

Berdasarkan pada tabel 3.4 diatas bahwa tingkat pengendalian intensitas konflik SARA sangat tinggi dengan realisasi 40% dari 37,3% target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 107,24% melihat tingginya realisasi terhadap target diatas menandakan rendahnya angka kesenjangan sosial yang terjadi pada tahun 2013 yang merupakan indikator dari kesejahteraan masyarakat.

Dalam wawancara terbuka disampaikan bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana

yang disampaikan oleh kepala sub bagian pengembangan otonomi daerah bagian tata pemerintahan ibu Dyah Intan Usaratrui, SIP, MA, M.Eng:

“Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemkot tidak saja hanya memberikan bantuan bantuan berupa materil, namun pemkot juga menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari usulan masyarakat. Jadi pembinaan yang dilakukan juga tepat sasaran. Selain itu pemkot juga menggeluntukan Dana hibah kepada masyarakat dalam bentu kelompok yang sudah dilakukan binaan tersebut”.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemkot telah melakukan pembinaan dan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat sebagaimana usulan dari masyarakat dan telah mengulirkan berbagai macam hibah /bantuan ke masyarakat, telah dibentuk kelompok–kelompok masyarakat dalam meneingkatkan produktivitas usaha masyarakat

C. Pelayanan dasar kepada masyarakat

Dalam masa transisi otonomi daerah ini, kesejahteraan masyarakat hendaknya tetap menjadi acuan dalam merumuskan peran pemerintah. Perumusan ulang tentang peran pemerintahan merupakan bagian dari reformasi sistem pemerintahan, selain penataan kelembagaan pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Dengan perumusan ulang tentang peran pemerintah, maka dapat dipetakan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik, kerena salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah barang tentu

tidak dapat dilayani secara keseluruhan oleh pemerintah pusat dan untuknya perlu didistribusikan ke daerah. Dalam konteks yang demikian, sistem desentralisasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi ini dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakannya melalui 3 (tiga) sasaran setrategi yang tertuang RPJMD 2012-2016 antara lain yaitu: (1) Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua, (2) Terwujudnya pelayanan administarasi publik yang baik, dan (3) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Namun untuk mewujudkan keberhasilan sasaran ini tentunya tidak terlepas dari indicator kinerja pendukung masing-masing sasaran seperti pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Angka Melek huruf	98,10%	98,10%	100%
	Angka partisipasi sekolah	91%	92%	101,10%
	Persentase jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusif	8,50%	8,24%	96,94%

*Sumber: LAKIP 2013 Kota Yogyakarta

Mewujudkan pendidikan inklusif adalah salah satu upaya pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat. Namun untuk mengukur keberhasilannya ada 3 (tiga) indikator kinerja pengukur keberhasilannya anrata lain:

a. Angka melek huruf

Berdasarkan tabel 3.5 angka huruf melek (AMH) pada tahun 2013 ditargetkan 98,1% dan realisasi 98,1 tercapai sebesar 100%, artinya penduduk kota yogyakarta usia diatas 15 tahun yang belum mampu membaca dan menulis penduduk semakin meningkat dengan adanya berbagai program pendidikan yang di buat oleh pemerintah kota Yogyakarta.

b. Angka partisipasi sekolah

Berkaca pada tabel 3.5 angka partisipasi sekolah dengan target yang ditetapkan sebesar 91% padah tahun 2013 mampu terealisasi 92% artinya jumlah penduduk usia yang bersekolah tahun 2013 sebesar 60.256 di banding jumlah penduduk usia sekolah 66.796 maka akan di dapat angka partisipasi sekolah. Sehingga perolehan persentase lebih dari 100% apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 1 %. Semakin tingginya angka partisipasi sekolah ini menunjukkan pelayanan yang diberikan pemerintah mampu menambah angka partisipasi tersebut.

c. Persentase jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusif

Indikator layanan pendidikan inklusi pada tahun 2013 dengan target yang ditetapkan sebesar 8,50% mampu terealisasi 8,24% dengan capaian kinerja sebesar 96,94%. Pencapaian ini belum mencapai target. Realisasi Pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pendidikan inklusi ialah suatu kegiatan pendidikan atau proses pembelajaran yang membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Namun meskipun demikian itu capain pada tahun 2013 dapat dikategorikan “sangat baik” jika membandingkan target dan realisasinya.

Selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat adalah mewujudkan pelayanan administrasi publik yang baik. Untuk menunjang keberhasilan pelayanan administari yang baik kemudian pemerintah kota Yogyakarta menjalanka beberapa indicator seperti yang tertuang pada tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6 Terwujudnya pelayanan administarasi publik yang baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya pelayanan administarasi publik yang baik	Indeks kepuasan masyarakat	74%	74,29%	100,39%
	Presentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat lewat unit pelayanan informasi dan keluhan.	91%	95,74%	105,21%

*Sumber: LAKIP 2013 Kota Yogyakarta

Selain pemberian pendidikan yang inklusif, pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat juga dilakukan dengan mewujudkan pelayanan administrasi public yang baik. Pelayanan administrasi public yang baik di wujudkan dengan menjalankan 2 (dua) indicator yaitu:

a. Indeks kepuasan masyarakat

Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit adalah gambaran persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta sebagai instansi pelayanan publik. Karena pelayanan kesehatan merupakan suatu sistem yang komponennya saling berhubungan, berkaitan dan saling mempengaruhi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga institusi pelayanan publik yg memberikan layanan kesehatan harus dapat mewujudkan pelayanan yang bermutu agar berkualitas dan memberikan kepuasan pasien. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien tersebut, dilakukan survei kepuasan layanan rumah sakit yang ditujukan kepada masyarakat sehingga memberikan nilai berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kenaikan 0,5 terdapat pada prosedur pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kepastian biaya pelayanan dan kenyamanan pelayanan.

b. Presentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat lewat unit pelayanan informasi dan keluhan

Indeks kepuasan layanan Kesehatan adalah gambaran persepsi masyarakat atau kualitas layanan kesehatan di Puskesmas se-Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung dilakukan survey kepuasan layanan kesehatan di Puskesmas yang di tujukan pengguna layanan Puskesmas, dan hasil survey tersebut diolah dan hasilnya indeks Kepuasan masyarakat.

Tabel 3.7 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Indeks kepuasan layanan rumah sakit	71%	75,79%	107%
	Indeks kepuasan layanan kesehatan	79,4%	77%	97%

*Sumber: LAKIP 2013 Kota Yogyakarta

Selain upaya diatas upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat adalah upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Untuk mewujudkan sasaran berikut pemerintah lakukan dengan cara mengkuru melalu 2 (dua) indikator sebagai berikut:

a. Indeks kepuasan layanan rumah sakit

Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit adalah gambaran persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta sebagai instansi pelayanan publik.

Karena pelayanan kesehatan merupakan suatu system yang komponennya saling berhubungan, berkaitan dan saling mempengaruhi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga institusi pelayanan publik yg memberikan layanan kesehatan harus dapat mewujudkan pelayanan yang bermutu agar berkualitas dan memberikan kepuasan pasien. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien tersebut, dilakukan survei kepuasan layanan rumah sakit yang ditujukan kepada masyarakat sehingga memberikan nilai berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kenaikan 0,5 terdapat pada prosedur pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kepastian biaya pelayanan dan kenyamanan pelayanan.

Pada tahun 2013 pemerintah Kota Yogyakarta memberikan target sebesar 71% dengan realisasi sebesar 77%. Melihat perbandingan target dan realisasi pada tahun 2013 ini capaian kinerja pada tahun ini sebesar 107% yang mana capaian yang sangat tinggi.

b. Indeks kepuasan layanan kesehatan

Indeks kepuasan layanan Kesehatan adalah gambaran persepsi masyarakat atau Kualitas layanan kesehatan di Puskesmas se-Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung dilakukan survey kepuasan layanan kesehatan di Puskesmas yang di tujukan pengguna layanan Puskesmas, dan hasil survey tersebut diolah dan hasilnya indeks Kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2013 pemerintah Kota Yogyakarta memberikan target sebesar 79,4 % dengan realisasi sebesar 75,79%. Melihat perbandingan target dan realisasi pada tahun 2013 ini capaian kinerja pada tahun ini sebesar 97%, meskipun realiasi belum mencapai target namun capaiannya dikategorikan sangat tinggi.

Dalam rangka mencapai keberhasilan indicator diatas pemerintah kota Yogyakarta melakukan beberapa langkah sebagai mana yang disampaikan oleh kepala sub bagian pengembangan otonomi daerah bagian tata pemerintahan:

“Ahamdulillah, hingga saat ini salah satu upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan pelayanan dasar, mulai dari wajib pendidikan hingga kesehatan. Bahkan kami mengeluarkan kartu menuju sejahtera untuk membantu warga masyarakat yang kurang mampu, sehingga bisa bersekolah dan mendapatkan pelayanan berobat gratis”.

Upaya dalam meningkatkan pelayanan dasar masyarakat seperti dalam pendidikan mewajibkan semua anak usia sekolah mendapatkan pendidikan dasar (SD-SMA) dan tidak ada alasan tidak ada biaya karena pemkot telah memberikan proporsi anggaran pendidikan yang besar dan dari fisik telah merehab sekolahsekolagh yang rusak, untuk kesehatan ada puskesmas di Yogyakarta yang melayani 24 jam dan hari minggu buka serta untuk beberapa puskesmas ada rawat inap , pemkot memiliki runah pemulihan gizi untuk anak yang kekurangan gizi, pemkot memiliki panti anak untuk menampung anak anak yang terlantar dan tidak mampu begitu pula panti untuk orang

jompo, bagi masyarakat yang mampu Pemkot memberikan KMS (Kartu Menuju Sejahtera) yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan keringan biaya sekolah maupun gratis untuk berobat, ada program rumah layak huni yaitu untuk membangunkan rumah masyarakat yang tidak mampu merehab rumah mereka dll.

D. Daya saing daerah dan/atau iklim investasi daerah

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

Daya saing juga dapat juga diartikan sebagai kapasitas bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya. Pada tahun 2013 pemerintah Kota Yogyakarta mencantumkan sasaran sebagai upaya dalam meningkatkan aspek daya saing daerah melalui sasaran: (1) Terwujudnya kualitas sumber daya masyarakat yang unggul (2) Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat. Sebagaimana yang diterangkan pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 3.8 Terwujudnya kualitas sumber daya masyarakat yang unggul

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya kualitas sumber	Indeks pembangunan manusia	79,54	80,2	100,77%
			**80,52	

daya masyarakat yang unggul	Tingkat kelulusan ujian nasional	90%	86%	96%
	Angka pengangguran terbuka	8,8% - 5,8%	6,57%	100%

Keterangan :

** Data berdasarkan BPS

a. Indeks pembangunan manusia

Secara umum kesejahteraan sosial yang didapat masyarakat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf. IPM adalah suatu indeks komposit yang mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Indeks ini mencakup tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Menurut UNDP, indeks ini dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak.

Berdasarkan pada tabel 3.8 diatas target IPM pada tahun 2013 sebesar 79,54 dengan realisasi sebesar 80,2. Melihat perbandingan target dengan realisasi pada tahun ini capaian kinerjanya sebesar 100,77% yang mana menunjukkan angka sangat tinggi dan menandakan adanya perubahan yang cukup signifikan pada perkembangan IPM. Adanya kenaikan IPM ini merupakan salah satu indikasi bahwa Kota Yogyakarta sudah berhasil meningkatkan daya saing daerahnya.

b. Tingkat kelulusan ujian nasional

Ketidaktercapaian kinerja pada indikator sasaran di atas, yakni realisasi kelulusan UN/UNPK tahun 2013 sebesar 86% sama dengan capaian tahun 2012, dan realisasi tersebut masih jauh di bawah target yakni 90%. Meskipun realisasi pada tahun ini tidak mencapai target yang ditetapkan namun capaiannya dapat dikategorikan “Tinggi”.

c. Angka pengangguran terbuka

Tenaga kerja merupakan salah faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah semakin besar jumlah tenaga kerja semakin pesat pula perkembangan wilayah tersebut lebih-lebih jika tenaga kerja tersebut disertai ketrampilan dan keahlian yang cukup memadai. Sehingga angka pengangguran di Kota Yogyakarta terus ditekan untuk menunjang percepatan pembangunan di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pada tabel 3.8 diatas pada tahun 2013 pemerintah menetapkan target 8,8% - 5,8% dengan realiasi sebesar 6,57%. Melihat perbandingan target dan realisasi pada tahun ini capaian kinerja mencapai sebesar 100%. Hal ini menandakan pemerintah Kota Yogyakarta mampu menekan atau mengurangi angka pengangguran terbuka di wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 3.9 Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Pertumbuhan ekonomi	4,92-5,8%	6,03%	103,97%
	Inflasi	4,5-5,5%	7,32%	66,91%
	Pendapatan pajak dan	172-177	Rp.	143,63%

	retribusi daerah	Milyar	245.224.852.524	
--	------------------	--------	-----------------	--

Upaya lain dalam rangka meningkatkan daya saing daerah adalah dengan cara mewujudkan perekonomian daerah yang kuat yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 5,76% menjadi 6,03%. Pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta pada tahun 2013 sebesar 6,03 persen mengalami kenaikan dibanding tahun 2012 Dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut adalah 5,76 persen. Adapun rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta dari tahun 2010 hingga tahun 2013 adalah 5,60 %.

Peningkatan tersebut didukung dari peningkatan PDRB di sektor jasa dan perdagangan antara lain dengan adanya pertumbuhan penunjang pariwisata. Pada tahun 2013, peranan sektor primer mencapai 0,22 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,25 persen, sector sekunder juga mengalami penurunan dari 19,01 persen pada tahun 2012 menjadi sebesar 18,88 persen pada tahun 2013. Sedangkan untuk sektor tersier yang merupakan kelompok sektor yang mempunyai peranan terbesar terhadap PDRB Kota Yogyakarta, pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu dari 80,74 persen menjadi 80,90 persen.

b. Inflasi

Inflasi pada tahun 2013 sebesar 7,32% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 4,31% persen jika di bandingkan

dengan Provinsi Jawa Tengah 7,99% maupun dengan inflasi di tingkat nasional 8,38 maka tingkat inflasi di kota Yogyakarta pada tahun 2013 masih lebih rendah. Tingkat inflasi di Kota Yogyakarta ini yang paling dominan atau tinggi adalah di sektor bahan makanan dan BBM. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya harga makanan sebagai akibat adanya banyak bencana alam yang terjadi di tahun 2013 sehingga produksi bahan makanan juga menjadi langka namun tingkat kebutuhan akan bahan pangan semakin tinggi. Laju inflasi pada tahun 2014 diestimasikan pada kisaran 5 – 6 %.

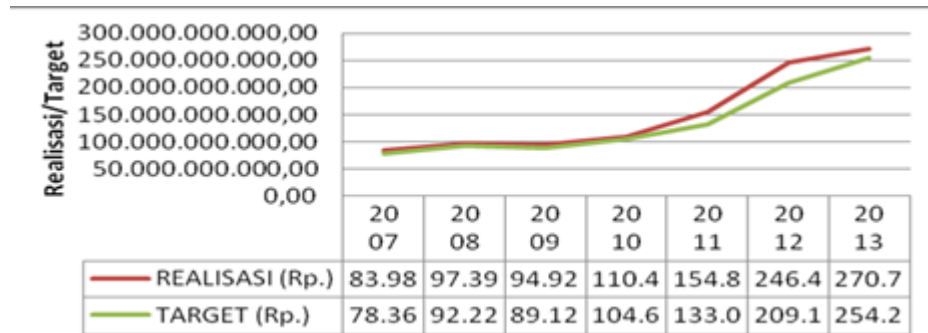
c. Pendapatan pajak dan retribusi daerah

Hasil pengukuran kinerja dalam formulir pengukuran kinerja dari Target Penda- patan Pajak dan Retribusi Daerah yang direncanakan sebesar 172-177 Milyar dalam Rencana Strategis, pada tahun 2013 ditetapkan target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah APBD 2013 sebesar Rp. Rp. 254.224.852.524. Persentase capaian dengan membandingkan antara target dengan realisasi sasaran tahun 2013 dihiitung sebagai berikut:

$$\frac{254.224.852.524}{177.000.000.000} \times 100\% = 143,50\%$$

Hasil evaluasi kinerja terlihat dalam persentase capaian rencana dan realisasi tahun 2013 sebesar 143,50%. Sebagai catatan masih terdapat gap lebih dari 10% dari perencanaan yaitu adanya kelebihan capaian sebesar 43,50%. Adanya gap yang cukup besar dari perencanaan renstra menunjukkan terdapat kondisi dinamis selama masa awal perencanaan dengan pelaksanaan yang tidak bisa atau belum diperhitungkan dalam perencanaan. Bila dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya dapat terlihat sebagai berikut

Dengan melihat data realisasi dan target Pajak dan Retribusi Daerah terlihat adanya trend yang naik setiap tahun. Dari gambar juga terlihat trend kenaikan dengan garis hampir sejajar antara realisasi dan target pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.



Dari data persentase capaian dan gambar target dan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah terlihat adanya gap yang semakin membesar mulai tahun 2010 dan mengecil pada tahun 2013. Adanya gap yang semakin membesar antara Target dan Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah ini menunjukkan belum optimalnya penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan. Pada tahun 2013 penetapan target Pajak dan Retribusi semakin optimal ditunjukkan oleh gap yang semakin mengecil. Meskipun demikian masih diperlukan upaya untuk lebih mengoptimalkan penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah.

Selain itu sebagai mana yang disampaikan oleh kepala sub bagian pengembangan otonomi daerah Untuk meningkatkan daya saing dan investasi daerah tentu melalui pembinaan dan promosi serta telah membuka gerai investasi

serta mempermudah pelayanan penanaman modal kepada investor asing maupun dalam negeri.